



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187  
TASIKMALAYA

Kode Pos : 46151

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 050/        / Sekretariat**

**TENTANG**

***PENETAPAN  
RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2025***

***DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2024***

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	I-1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU</b> .....	II-1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	II-1
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 DAN TAHUN BERJALAN (2024).....	II-1
2.1.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA.....	II-31
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	II-33
2.2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.....	II-33
2.2.2. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA DALAM SPM/ IKK/ RPJMD.....	II-55
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	II-63
2.3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	II-63
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	II-64
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	II-65
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	III-1
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	III-1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB TAHUN 2024.....	III-2
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB TAHUN 2024.....	III-6
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	IV-1
4.1. KESIMPULAN.....	IV-1
4.2. REKOMENDASI.....	IV-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan Rancangan Awal RKP.

Yang dimaksud dengan rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam RPJMD.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun untuk rencana kerja tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun 2024 merupakan Tahun Ke-1 dari RPD 2023-2026.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 133)
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan daerah Kota tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada Dinas Perhubungan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian Visi Misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, serta melaksanakan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 yang merupakan Tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah baik yang berskala nasional maupun daerah.

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengemukakan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap Bab.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 2.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan terdepan.
  
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

Bab ini menggambarkan rencana kerja dan anggaran tahun 2025

## BAB V PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah.

### 5.2. REKOMENDASI

Memuat saran-saran / masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan periode berikutnya dalam lingkup pencapaian visi dan misi Renstra Perangkat Daerah.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

##### 2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN TAHUN BERJALAN (2024).

Evaluasi renja tahun 2023 dapat digambarkan melalui realisasi program dan kegiatan tahun 2023 dari tingkat penyerapan anggaran dan prosentase capaian fisik kegiatan. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya **telah melaksanakan dua (dua) program dan 14 (Empat belas) kegiatan** dengan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar Rp. 65.321.225.750,- (Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut berhasil diserap sebesar Rp. 64.958.798.312,- (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) atau proporsi realisasi anggaran sebesar 99,40 %. Adapun rincian program dan kegiatan (Belanja Langsung) tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

TABEL 2.1. EVALUASI HASIL RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023



Table 1  
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		K ET
				I		II		III		IV						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		17
			-													
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>															
			65.321.225.750		12.046.766.598		13.817.370.431		10.243.788.126		28.776.523.797		64.958.798.312		99,45	

				<b>65.321.225.750</b>		<b>12.046.766.598</b>		<b>13.817.370.431</b>		<b>10.243.788.126</b>		<b>28.776.523.797</b>		<b>64.958.798.312</b>		<b>99,45</b>	
	<b>Tercapainya IKM Perangkat Daerah</b>	<b>Kategori/Nilai</b>	<b>79</b>	-	-	-	-	-	79	-	79	-	79	-	-	-	
	<b>Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Kategori/Nilai</b>	<b>82,75/A</b>	<b>43.528.205.450</b>		<b>11.909.886.335</b>		<b>82,11/A</b>	<b>11.194.446.713</b>	<b>82,11/A</b>	<b>9.824.280.536</b>	<b>82,11/A</b>	<b>10.326.854.225</b>	<b>82,11/A</b>	<b>43.255.467.809</b>	<b>82,11/A</b>	<b>99,37</b>
	<b>Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>104.560.000</b>		<b>20.565.000</b>		<b>15.425.000</b>	-	<b>25.220.000</b>	-	<b>41.635.926</b>	<b>8</b>	<b>102.845.926</b>	<b>100,00</b>	<b>98,36</b>	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	84.560.000	1	20.565.000		12.285.000		18.000.000		31.995.926	2	82.845.926	100,00	97,97	
	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Capaian Kinerja	Dokumen	1	20.000.000		-		3.140.000	-	7.220.000		9.640.000	1	20.000.000	100,00	100,00	
	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>9.371.830.750</b>	-	<b>2.009.682.415</b>		<b>3.256.667.773</b>	<b>1</b>	<b>2.031.950.056</b>	<b>2</b>	<b>1.853.729.294</b>	<b>2</b>	<b>9.152.029.538</b>	<b>100,00</b>	<b>97,65</b>	
	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	9.356.830.750	3	2.009.682.415	5	3.256.667.773	3	2.024.450.056	3	1.846.29.294	14	9.137.029.538	100,00	97,65	

	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	2	7.500.000	-	-	-	-	-	2	7.500.000	2	7.500.000	100,00	100,00		
	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	7.500.000	-	-	-	1	7.500.000			1	7.500.000	100,00	100,00		
	Jumlah barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>37.500.000</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>9.990.400</b>	<b>1</b>	<b>26.952.900</b>	<b>2</b>	<b>36.943.300</b>	<b>100</b>	<b>98,52</b>	
	Jumlah dokumen perencanaan barang milk daerah	Dokumen	1	7.500.000	-	-			7.500.000	1	-	1	7.500.000	100,00	100,00		
	Jumlah Perenaan Daerah SKPD	Bulan	12	25.000.000	-	-				12	24.483.300	12	24.483.300	100,00	97,93		
	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	Dokumen	2	5.000.000	-	-		1	2.490.400	1	2.469.600	2	4.960.000	100,00	99,20		
	Jumlah dokumen administrasi pendapatan perangkat daerah	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>5.000.000</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>4.992.500</b>	<b>4</b>	<b>4.992.500</b>	<b>100,00</b>	<b>99,85</b>	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	5.000.000	-	-	1	-	1	-	2	4.992.500	4	4.992.500	100,00	99,85	

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dokumen	12	33.000.000	-	-	-	-	-	12	32.927.600	1	32.927.600	100,00	99,78		
Jumlah pakaian Dinas Pegawai	Potong	80	28.000.000	-	-	-	-	-	80	27.927.600	80	27.927.600	100,00	99,74		
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	5.000.000	-	-	-	-	-	12	5.000.000	12	5.000.000	100,00	100,00		
Jumlah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Paket	1	526.691.700	1	36.635.370	128.510.311	162.375.652	195.846.466	1	523.367.799	100,00	99,37				
Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Unit	10	5.000.000	-	-	4.973.000	-	-	10	-	10	4.973.000	100,00	99,46		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Unit	10	2.500.000	-	-	2.479.000	-	-	10	-	10	2.479.000	100,00	99,16		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Unit	5	31.653.400	-	-	1.008.000	3.989.000	26.610.300	5	26.610.300	5	31.607.300	100,00	99,85		
Jumlah Perencanaan dan Penggandaan	Jenis	4	51.985.300	1	2.576.250	37.790.241	4.810.000	6.770.000	1	4.810.000	4	51.946.491	100,00	99,93		

	Jumlah dan Peraturan Perundang	Eksampl	12	34.800.000	-	6.680.000	6	8.015.000	3	9.435.000	3	7.785.000	12	31.915.000	100,00	91,71		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jenis	20	25.000.000	-	-	20	23.381.070		1.484.000		-	20	24.865.070	100,00	99,46		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dus	100	30.000.000	25	1.000.000	45	4.975.000	20	11.090.000	10	12.883.000	100	29.948.000	100,00	99,83		
	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	30	345.753.000	6	26.379.120	9	45.889.000	4	131.567.652	21	141.798.166	30	345.633.938	100,00	99,97		
	Jumlah Jasa penunjang perangkat daerah	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>33.092.117.000</b>	<b>1</b>	<b>9.811.794.278</b>	<b>1</b>	<b>7.726.530.921</b>	<b>1</b>	<b>7.515.125.054</b>	<b>1</b>	<b>8.020.171.766</b>	<b>4</b>	<b>33.073.622.019</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>		
	Jumlah materai dan buku cek	Unit	10	2.700.000	-	1.500.000	8	1.200.000	1	-	1	-	10	2.700.000	100,00	100,00		
	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	32.692.511.000	3	9.744.737.278	3	7.613.809.771	3	7.421.582.900	3	7.895.090.066	12	32.675.220.015	100,00	99,95		
	Jumlah pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	396.906.000	3	65.557.000	3	111.521.150	3	93.542.154	3	125.081.700	12	395.702.004	100,00	99,70		

	Jumlah barang perangkat daerah yang terpelihara	Unit	49	357.50 6.000	7	31.209. 272	11	67.312. 708	15	79.619. 374	55	150.59 7.773	49	328.73 9.127	100 ,00	91, 95		
	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Unit	18	137.12 2.000	2	12.024. 452	3	26.051. 183	5	23.056. 350	8	48.839. 940	18	109.97 1.925	100 ,00	80, 20		
	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	Unit	31	220.38 4.000	5	19.184. 820	8	41.261. 525	10	56.563. 024	8	101.75 7.833	31	218.76 7.202	100 ,00	99, 27		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>															100 ,00	98, 18		
<b>Predikat Kinerja</b>																		
				-														
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	51, 96	21.229. 824.30 0	51 ,9 6	95.702. 832	51, 96	2.557.2 29.358	53, 75	356.15 3.230	55, 36	18.133. 537.51 4	55, 36	21.142. 622.93 4	106 ,54	99, 59		
	Persentase pelayanan andalalin	%	100	-	60	-	80	-	100	-	140 ,00	-	140 ,00	-	140 ,00	-		
	Persentase pelayanan angkutan umum	%	100	503.24 6.000	21 ,1 8	41.177. 431	40, 84	65.694. 360	62, 59	63.354. 360	164 ,50	257.48 1.758	164 ,50	502.05 7.269	164 ,50	99, 76		

	<b>Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan</b>	%	<b>85,91</b>	<b>59.950.000</b>	<b>14,99</b>	-	<b>24,58</b>	-	<b>42,36</b>	-	<b>110,58</b>	<b>58.650.300</b>	<b>110,58</b>	<b>58.650.300</b>	<b>128,71</b>	<b>97,83</b>		
	<b>Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan kab/kota</b>	Jenis	<b>13</b>	<b>20.501.704.300</b>	<b>1</b>	<b>12.081.144</b>	<b>2</b>	<b>2.347.398.716</b>	<b>3</b>	<b>182.401.646</b>	<b>7</b>	<b>17.879.997.816</b>	<b>13</b>	<b>20.421.879.322</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>		
	Jumlah perlengkapan jalan terpasang	Jenis	5	19.493.000.000	-	-	1	1.607.815.600	2	-	2	17.809.886.300	5	19.417.701.900	100,00	99,61		
	Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi/dipelihara	Jenis	8	1.008.704.300	1	12.081.144	1	739.583.116	1	182.401.646	5	70.111.516	8	1.004.177.422	100,00	99,55		
	<b>Jumlah Terminal Type C Terkelola</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>213.930.000</b>	<b>5</b>	<b>33.977.431</b>	<b>5</b>	<b>54.594.360</b>	<b>5</b>	<b>50.994.360</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>213.915.511</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>		
	Jumlah peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal type C	Orang	25	213.930.000	5	33.977.431	5	54.594.360	5	50.994.360	10	74.349.360	25	213.915.511	100,00	99,99		
	<b>Jumlah pembangunan fasilitas /sarana prasarana parkir</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>	<b>358.320.000</b>	<b>3</b>	<b>34.739.664</b>	<b>3</b>	<b>111.883.856</b>	<b>3</b>	<b>100.293.910</b>	<b>3</b>	<b>106.996.912</b>	<b>12</b>	<b>353.914.342</b>	<b>100,00</b>	<b>98,77</b>		

	Jumlah koordinasi/pengawasan/pembinaan perparkiran	Unit	12	358.320.000	3	34.739.664	3	111.883.856	3	100.293.910	3	106.996.912	12	353.914.342	100,00	98,77		
	<b>Jumlah terlayannya kendaraan wajib uji</b>	<b>Kendaraan</b>	<b>20000</b>	<b>59.950.000</b>	<b>4.236</b>	<b>-</b>	<b>3.932</b>	<b>-</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>		<b>58.650.300</b>	<b>20.000</b>	<b>58.650.300</b>	<b>100,00</b>	<b>97,83</b>		
	Jumlah bukti lulus uji /smart card pengujian berkala kendaraan bermotor	Set	20000	59.950.000	-	-		-		-	10.000	58.650.300	20.000	58.650.300	100,00	97,83		
	<b>Jumlah terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>369.800.000</b>		<b>48.882.024</b>		<b>97.946.786</b>		<b>73.457.674</b>		<b>146.542.786</b>	<b>1</b>	<b>366.829.270</b>	<b>100,00</b>	<b>99,20</b>		
	Jumlah dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota	Dokumen	1	7.500.000							1	7.409.500	1	7.409.500	100,00	98,79		
	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota	Bulan	12	352.300.000	3	48.882.024	3	97.946.786	3	73.457.674	3	129.133.286	12	349.419.770	100,00	99,18		

	Jumlah koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan	Kali	30	10.000.000						-	30	10.000.000	30	10.000.000	100,00	100,00		
	<b>Jumlah angkutan umum/orang dalam trayek angkutan</b>	<b>Kendaraan</b>	<b>1001</b>	<b>289.316.000</b>	<b>150</b>	<b>7.200.000</b>	<b>168</b>	<b>11.100.000</b>	<b>106</b>	<b>12.360.000</b>	<b>577</b>	<b>257.481.758</b>	<b>1.001</b>	<b>288.141.758</b>	<b>100,00</b>	<b>99,59</b>		
	Jumlah moda angkutan publik/pengembangan moda angkutan	Kendaraan	5	272.816.000		7.200.000		11.100.000		11.100.000	5	242.286.758	5	271.686.758	100,00	99,59		
	Jumlah moda layanan angkutan publik/pengembangan moda angkutan	Kendaraan	1001	16.500.000						1.260.000	1.001	15.195.000	1.001	16.455.000	100,00	99,73		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>															<b>100,00</b>	<b>99,17</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)</b>																		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)</b>																		

Sebagaimana kita ketahui, sebgaiian kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah mengelola pendapatan asli daerah di bidang perhubungan yaitu retribusi parkir tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek dan terminal. Evaluasi renja untuk penerimaan pendapatan asli daerah dapat digambarkan dari prosentase realisasi penerimaan terhadap target target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2023 penerimaan PAD dari empat jenis retribusi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 : Penerimaan Asli Aderah Tahun 2023 Dinas Perhubungan

No	Retribusi	Target	Capaian	%
1.	Parkir	2.000.006.000,00	1.603.614.000,00	80,18
2.	Pengujian Kendaraan Bermotor	2.017.090.000,00	2.208.045.000,00	99,55
3.	Terminal	404.055.000,00	365.100.000,00	90,36
4.	Trayek	105.225.000,00	51.004.500,00	48,47
<b>Jumlah</b>		<b>4.526.376.000,00</b>	<b>3.726.180.300,00</b>	<b>88,98</b>

Selanjutnya dari realisasi program dan kegiatan sebagaimana terurai diatas adalah merupakan kinerja perangkat daerah tahun 2023 yaitu berdasarkan Indikator Capaian Kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya 2013-2026. Dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau program dilaksanakan melalui pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah” yang mana laporan Akuntabilitas ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya atas pengguna anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengkuran kinerja .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis.

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disajikan dalam bentuk tabel 2.3 dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2023**

Tabel 6.4 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2025										
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) /Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program				
						2023				
						Target	Capaian Tri I	Capaian Tri II	Capaian Tri III	Capaian Tri IV
1. Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan			%	44,5				
					%	67,23	37,69	46,64	55,90	62,37
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	%	57,14	55,71	56,61	57,14	57,14
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	77,32	19,68	36,68	54,67	67,60
2. Terwujudnya implementasi repomasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan Meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Tercapainya IKM Perangkat Daerah			Nilai / Indek		-	-		
					Nilai / Kategori	79,00 (B)			79,11 (B)	79,11 (B)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai IKM	Point / Nilai	79,00 (B)			79,11 (B)	79,11 (B)
				Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai / Kategori	82,60 (A)			70,21 (BB)	70,21 (BB)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point / Nilai	82,75 (A)			70,21 (BB)	70,21 (BB)

Sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”, dengan indikator sasaran “Tercapainya IKM Perangkat Daerah” realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 mencapai Nillai 79,11 (B) atau lebih target sebesar 0,11 dari target semula yang telah ditentukan.

Sasaran kedua “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran tercapainya SAKIP perangkat daerah” realisasi mencapai 70,21(A) atau kurang dari target yang telah ditentukan.

Sasaran ketiga “Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas dan Angkutan Umum dengan Indikator Kinerja “ Persentase Kenyamanan Berlalu Lintas dan Angkutan Umum” realisasi mencapai nilai 62,37 % atau kurang dari target sebesar 4,86 %.

### 2.1.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi out put dan out come yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengann kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan atau beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Analisa Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dan capaian output dan outcome yang dihasilkan berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.

**Tabel 2.4. Pengukuran Evaluasi dan Capain Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal 2021 / 2022 (Tri IV)	Capaian kinerja tahun 2023 (Tri I)	Satuan
1	Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan	60,09	37,69	%

		angkutan jalan			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Tercapainya IKM perangkat daerah	78,00		
3	Meningkatnya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,59 (A)		

#### 2.1.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

##### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran “meningkatkan kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan” mempunyai definisi operasional adalah jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dengan tingkat terlayani angkutan umum. Sasaran tersebut yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023-2026, dimana kondisi awal pada tahun 2022 ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan baru 251 ruas jalan dari 560 ruas jalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 10 ruas jalan terealisasi sebanyak 25 ruas jalan antara lain : 1) Jl. Otista; 2) Jl. Dr Soekarjo, 3) Jl. Tentara Pelajar, 4) Jl. Mayor Utarya, 5) Jl. Sutisna Senjaya 6) Jl. Ahmad Yani 7) Jln Galunggung 8) Jl Mitra Batik, 9) K.H Khoer Affandi, 10) Jl Cipedes I 11) Jl Cipedes II 12) Jl Elang Subandar, 13) Jl. Rumah Sakit, 14) Jl. RAA Wiratanuningrat, 15) Jl.Pancasila, 16) Jl. Tarumanagara, 17) Jl. Veteran, 18) Jl Siliwangi, 19) Bantar, 20) Ir H Juanda, 21) Jl. Perintis Kemerdekaan, 22) Jl. Moh.Hatta, 23) Jl E.Z. Muttaqin, 24) Jl Cihideung, 25) Jl RE Martadinata.

Yang dimaksud ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan adalah ruas jalan yang telah dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 berupa :

- a. Rambu-Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Traffic Light dan Warning Light
- d. Penerangan Jalan umum
- e. Area Traffic Control System

Adapun pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebanyak 594 Titik Penerangan jalan Umum

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Target indikator kinerja pada sasaran pertama adalah Nilai 79 sedangkan realisasi kinerja sebesar 79,03, dengan demikian untuk indikator sasaran pertama mendapat interpretasi “Baik”.

Adapun secara umum dapat dijelaskan bahwa capaian target ini melebihi sebesar 0,3, hal ini diperoleh dari jumlah rata-rata capaian program peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dimana indikator program tersebut adalah “Tercapainya IKM Perangkat Daerah”, realisasi Nilai sebesar 79,03 dari target Nilai 79 yang ditetapkan. Dan “Capaian hasil survei kepuasan masyarakat”, realisasi sebesar 79,03 dari target 79 yang ditetapkan.

### **2.1.5. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Sasaran ke-2 adalah “Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah” dapat diartikan bahwa jumlah dokumen perencanaan (LKPJ), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Hasil Forum SKPD, Musrenbang, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Monev Triwulan , Hal tersebut dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta terlaksananya pengkoordinasian , pencatatan, pendistribusian , pemrosesan, dan pengarsipan dokumen dengan baik.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Target indikator kinerja pada sasaran kedua dengan nilai 82,75 dan realisasi kinerja sebesar 82,11 dengan demikian untuk indikator sasaran kedua mendapat interpretasi nilai “A”.

Adapun secara umum dapat dijelaskan bahwa capaian target ini adalah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini diperoleh dari tercapainya nilai SAKIP Perangkat Daerah.

## 2.1.6. Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola tahun 2023 adalah terealisasi mencapai Rp. 3.726.180.300,- sehingga terdapat kekurangan target sebesar Rp. 800.195.700,- atau 11,02 %. Berikut rincian penerimaan per-objek retribusi PAD tahun 2023 adalah :

**Tabel II – 1 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023**

No	Retribusi	Target	Capaian	%
1.	Parkir	2.000.006.000,00	1.603.614.000,00	80,18
2.	Pengujian Kendaraan Bermotor	2.017.090.000,00	2.208.045.000,00	99,55
3.	Terminal	404.055.000,00	365.100.000,00	90,36
4.	Trayek	105.225.000,00	51.004.500,00	48,47
<b>Jumlah</b>		<b>4.526.376.000,00</b>	<b>3.726.180.300,00</b>	<b>88,98</b>

Sumber : Dishub Kota Tasikmalaya Tahun 2023

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja pendapatan asli daerah diukur dengan prosentase capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang diterima selama tahun 2023 yaitu dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 88.98 % atau .

3.726.180.300,- Jumlah ini dicapai dari penerimaan empat jenis retribusi sebagaimana terurai di atas.

Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum mencapai nilai penerimaan kurang sebesar 19.82% atau Rp. 1.603.614.000,00 dari target yang telah ditentukan. Realisasi kekurangan target penerimaan ini merupakan kendala dalam parkir tepi jalan umum yang salah satu faktornya adalah pengendalian dan pengawasan dilapangan yang masih kurang baik disebabkan masih terdapatnya parkir-parkir liar serta kedisiplinan pekerja parkir yang sering tidak memberikan karcis menjadi penyebab tidak terealisasinya target penerimaan yang telah ditargetkan pemerintah.

Penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai nilai penerimaan lebih sebesar 99,55% atau 2.208.045.000,00,- dari target yang telah ditentukan. Kekurangan target penerimaan ini disebabkan antara lain karena masyarakat sudah mengetahui mengenai UU No 1 tahun 2022 yang isinya Retribusi akan dihapuskan.

Penerimaan retribusi Jasa Usaha Terminal mencapai nilai penerimaan kurang sebesar 90.36% atau Rp. 365.100.000,00,- dari target yang telah ditentukan. Kekurangan ini disebabkan karena adanya kebijakan terhadap operasi angkutan berbasis online. Hal ini berdampak terhadap pendapatan yang diterima oleh awak angkutan kota yang beroperasi. Terjadinya kesenjangan tersebut menyebabkan penerimaan retribusi di sektor ini tidak maksimal.

Penerimaan retribusi Ijin Trayek mencapai penerimaan kurang sebesar 48.47% atau Rp. 51.004.500,00,-. Kekurangan tersebut sama persis dengan penerimaan retribusi Jasa Usaha Terminal karena objek retribusina sama yaitu angkutan kota. Dengan adanya angkutan berbasis online tersebut terjadi kesenjangan dari para pemilik moda angkutan kota yang berdampak terhadap kurang mengindahkannya perpanjangan ijin trayek yang akhirnya berdampak terhadap penerimaan retribusi di bidang ini.

Selanjutnya Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) dilakukan sampai dengan akhir bulan Maret (Triwulan I). Dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah **target pendapatan** TA. 2024 sebesar **Rp. 3.601.003.000,-** (Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ribu Rupiah). Dengan jumlah **realisasi penerimaan** sebesar **Rp. 301.082.000** ,- (Tiga Ratus Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II – 2 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2024 sd. 23 Maret 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN s.d. Triwulan I</b>	<b>NILAI CAPAIAN (%)</b>
1.	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	3.601.003.000	301.082.000	8,36
<b>JUMLAH</b>		<b>3.601.003.000</b>	<b>301.082.000</b>	<b>8,36</b>

Sumber : *Laporan Triwulan I TA. 2024 DISHUB Kota Tasikmalaya*

Selanjutnya dalam hal Belanja Langsung pada **Tahun Anggaran 2024 sedang melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan.** Adapun Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I disajikan dalam tabel berikut :



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok ***"membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan"***.

#### B. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

#### C. KEWENANGAN

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

## **1) Kepala Dinas**

Tugas pokok : merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.

Rincian Tugas Kepala Dinas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perhubungan;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretariat**

Tugas pokok : menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas;
- c. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan dinas;

- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- e. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perhubungan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang perhubungan;
- g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

### **2.1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

Tugas pokok : mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja dinas;
- c. mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang perhubungan;
- e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang perhubungan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi bidang perhubungan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3) Bidang Lalu Lintas**

Tugas pokok : menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan dalam manajemen lalu lintas, pengelolaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pembinaan keselamatan lalu lintas dan pengendalian operasional lalu lintas.

Rincian tugas Bidang Lalu Lintas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota dan jalan provinsi serta jalan negara yang berada di wilayah kota;

- d. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan serta lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kota;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang lalu lintas;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
- h. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan parkir;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan perijinan atau rekomendasi di bidang lalu lintas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Lalu Lintas;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas membawahkan :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. Seksi Fasilitas Lalu Lintas; dan
- c. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

### **3.1) Seksi Manajemen Lalu Lintas**

Tugas pokok melaksanakan penyusunan kajian dan bahan pengaturan lalu lintas, pengelolaan perparkiran serta rekomendasi teknis/perizinan bidang lalu lintas.

Rincian tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan lalu lintas pada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara yang berada di wilayah kota;
- c. melaksanakan pengelolaan data tingkat pelayanan lalu lintas;
- d. melaksanakan pengelolaan analisis dampak lalu lintas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pedoman teknis pengelolaan parkir;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis /perizinan bidang lalu

lintas;

- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2) Seksi Fasilitas Lalu Lintas**

Tugas pokok : melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.

Rincian tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- c. melaksanakan penyediaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap kondisi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- e. melaksanakan pengelolaan data base fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3) Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas**

Tugas pokok : melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap keselamatan dan operasional lalu lintas serta angkutan jalan.

Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara yang berada di wilayah kota;
- c. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melaksanakan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan rencana operasional penertiban lalu lintas;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4) Bidang Angkutan**

Tugas pokok : menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan manajemen angkutan, bina usaha angkutan serta prasarana dan sarana angkutan. Rincian tugas Bidang Angkutan :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Angkutan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah;

- d. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan;
- e. menyelenggarakan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
- f. menyelenggarakan pembinaan manajemen angkutan untuk jaringan trayek dan jaringan lintas;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman pengujian kendaraan bermotor;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian angkutan;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi /perijinan angkutan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Angkutan;
- l. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan, membawahkan :

- a. Seksi Manajemen Angkutan;
- b. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.

#### **4.1) Seksi Manajemen Angkutan**

Tugas pokok melaksanakan penyusunan kajian, standarisasi, dan pengaturan angkutan serta penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang dan terminal barang.

Rincian tugas Seksi Manajemen Angkutan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Manajemen Angkutan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan konsep kerjasama bidang angkutan dengan wilayah perbatasan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, pengembangan, pengelolaan dan pengaturan terminal penumpang dan terminal barang;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan

- tidak bermotor;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan yang terintegrasi dengan sistem informasi dinas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Manajemen Angkutan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2) Seksi Bina Usaha Angkutan**

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam pembinaan usaha angkutan.

Rincian tugas Seksi Bina Usaha Angkutan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha Angkutan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan konsep pengaturan perusahaan angkutan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan pengemudi/awak angkutan umum;
- d. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi /perijinan angkutan;
- e. melaksanakan pengelolaan data base perijinan angkutan;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi perijinan angkutan yang terintegrasi dengan sistem informasi dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha Angkutan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan**

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan operasional prasarana dan sarana angkutan.

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana angkutan;

- c. melaksanakan proses penyediaan sarana dan prasarana angkutan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengelolaan prasarana dan fasilitas penunjang terminal penumpang dan terminal barang serta tempat-tempat pemberhentian penumpang (Halte/Shelter);
- f. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana teknis angkutan;
- g. melaksanakan pengelolaan data base prasarana dan sarana angkutan;
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana angkutan yang terintegrasi dengan dengan sistem informasi dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### A. SDM APARATUR

Jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sebanyak 87 orang. Dengan rincian seperti tabel berikut :

Pendidikan formal dari 87 orang pegawai hanya 6 orang atau 6% yang berpendidikan S2, 30 orang atau 30% yang berpendidikan S1. Sedangkan pegawai berpendidikan SLTA dan lebih rendah menempati jumlah tertinggi sebanyak 42 orang atau 42% dari jumlah pegawai yang ada. Komposisi demikian bukan tidak mungkin akan menjadi penghambat dalam percepatan pemberian pelayanan organisasi.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	S-3	-	-	-
2	S-2	6	-	6
3	S-1/D.IV	25	5	30
4	DIII/Akademi	2	-	2
5	DII	4	3	7
6	DI	-	-	-

7	SLTA dan lebih rendah	41	1	42
Jumlah		78	9	87

Upaya yang telah dilaksanakan khususnya kepada pegawai yang masih setingkat SLTA dan lebih rendah adalah dengan mendorong kepada beberapa pegawai untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Status pegawai pns berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 79 orang atau 79% dari jumlah pegawai yang ada. Hal ini, tentu akan sangat membantu tugas perhubungan di lapangan.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	PNS	79	8	87
2	Tenaga Kontrak Kerja	-	-	-
Jumlah		79	8	187

Pangkat/golongan pegawai, gol. II mendominasi yaitu 44 orang atau 44%. Apabila dilihat dari struktur organisasi dan tugas pokok yang ada. Komposisi yang ada cukup ideal untuk menempati beberapa unit kerja yang ada yaitu dari satu orang gol. III dapat didampingi oleh dua orang gol. II.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	Golongan IV	3	-	3
2	Golongan III	35	5	40
3	Golongan II	40	4	44
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		78	9	87

Pegawai yang menduduki jabatan struktural, eselon IV berada diangka 14 menunjukkan bahwa masih ada jabatan struktural di eselon IV yang belum terisi yaitu dua jabatan struktural. Dan di eselon III satu jabatan struktural. Upaya agar

tidak terjadi penurunan tingkat pelayanan perhubungan, pada eselon III ditunjuk pegawai pelaksana teknis (PLT)

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural**

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	0	2
3	Eselon IV	13	1	14
Jumlah		16	1	17

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional, apabila dikaitkan dengan analisa beban kerja pada tingkat penyelia masih perlu ditambah satu orang, pelaksana lanjutan tiga orang, pelaksana empat orang dan pelaksana pemula enam orang. Kondisi ini tentu akan menghambat percepatan pelayanan perhubungan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang telah dilakukan, adalah mendorong pegawai pns khususnya pegawai gol. II untuk mengikuti pendidikan fungsional yang dibutuhkan. Serta mendorong meningkatkan jenjang jabatan fungsional untuk mengisi kekurangan jabatan fungsional yang lebih tinggi.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional**

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	PKB Penyelia	5	-	5
2	PKB Pelaksana Lanjutan	0	-	0
3	PKB Pelaksana	3	-	3
4	Analisis Kebijakan	2	-	2
Jumlah		10	3	13

Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pns kader/calon pejabat dan atau bagi pns yang sedang menduduki salah satu jabatan struktural. Pada jabatan yang ada masih terdapat beberapa pejabat yang belum mengikuti diklatpim tersebut. Diklatpim III seharusnya 3 orang. Diklatpim IV seharusnya 14 orang.

Diklat teknis perhubungan hanya 19% dari jumlah pegawai yang ada. Sementara untuk Diklat PPNS cukup.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah bersurat usulan mengikuti Diklatpim dan mendorong kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya melalui diklat teknis perhubungan dan diklat lain yang menunjang terhadap tugas dan fungsi organisasi.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal**

No	Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	Diklat PIM II	1	0	1
2	Diklat PIM III	1	0	1
3	Diklat PIM IV	6	1	7
4	Diklat Teknis Perhubungan	18	1	19
5	Diklat PPNS	3	0	3
Jumlah		29	2	31

Analisa beban kerja merupakan salah satu cara untuk pemetaan pegawai. Dari tabel 1.8 apabila dilihat dari hasil analisa beban kerja, diketahui bahwa di bidang lain masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 yang memiliki kualifikasi pendidikan setara S1.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Pegawai Menurut Bidang/Unit Kerja**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan						
		L	P	A	B	C	D	E	F	G
1	Sekretariat	15	2	0	1	8	1	0	0	7
2	Bidang Lain	33	1	0	4	1	0	0	0	29

3	Bidang Angkut an	9	1	0	1	4	2	0	0	3
4	UPTD Terminal	15	0	0	1	2	0	0	0	12
5	UPTD PKB	11	1	0	0	4	0	1	0	7
6	UPTD Parkir	9	1	0	2	3	0	0	0	5
	Jumlah	92	6	0	9	22	3	1	0	63
Ket : A : S3; B : S2; C : S1; D : DIII; E : DII, F : D1; G : SLTA dan lebih rendah										

## B. PRASARANA DAN SARANA APARATUR

Kendaraan jabatan adalah salah satu sarana mobilitas bagi para pejabat struktural. Dari jumlah kendaraan yang ada, sarana mobilitas bagi pejabat sudah terpenuhi.

Namun ada beberapa kendaraan yang kondisinya perlu mendapat perhatian. Dengan pertimbangan nilai ekonomis dan meningkatkan pelayanan aparatur, dipandang perlu kendaraan tersebut diganti dengan yang lebih baik.

**Tabel 2.8**

### Jumlah Kendaraan Jabatan

No	Jenis Kendaraan
	Roda 4 (Empat)
4	
	<b>Jml Kend =</b>
	Roda 2 (Dua)
11	
	<b>Jml Kend = 15</b>

Kendaraan operasional adalah salah satu sarana mobilitas bagi para pelaksanaan tugas operasional organisasi. Dari jumlah kendaraan yang ada, sudah cukup. Namun ada satu kendaraan yang kondisinya kurang layak operasional. Hal tersebut dipandang perlu adanya penggantian. Yaitu untuk kendaraan operasional Z 8011 H

**Tabel 2.9****Jumlah Kendaraan Operasional**

No	Merk Kendaraan
	Roda 4 (Empat)
	22
<b>Jml Kend =</b>	
	Roda 2 (Dua)
	11
<b>Jml Kend = 33</b>	

Peralatan gedung kantor adalah alat-alat yang harus tersedia dalam proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Upaya yang sedang dan akan ditempuh adalah menyediakan anggaran yang cukup baik yang bersumber dari APBD maupun dari bantuan keuangan pusat/provinsi untuk pengadaan kekurangan alat pengujian dan mengganti peralatan yang sudah tua.

**Tabel 2.10****Daftar Peralatan Gedung Kantor (Pengujian Kendaraan Bermotor)**

No	Nama Barang	Jml	Sat	Kondisi
1	Alat Emisi Gas Buang	1	Unit	Baik
2	Alat Uji Ketebalan Asap	2	Unit	Baik
3	Alat Uji Kebisingan	2	Unit	Baik
4	Alat Uji Rem	1	Unit	Baik
5	Alat Uji Lampu	1	Unit	Baik
6	Alat Uji Kincup Roda Depan	1	Unit	Baik
7	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	2	Unit	Baik
8	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	1	Unit	Baik
9	Alat Pengukur Berat	1	Unit	Baik
10	Alat Ukur Dimensi	1	Unit	Baik
11	Alat Uji Tembus Cahaya pada Kaca	1	Unit	Baik
12	Alat Uji Minyak Rem	1	Unit	Baik
13	Kompresor Udara	1	Unit	Baik

14	Generator Set	1	Set	Baik
15	Peralatan Bantu (Dongkrak, Pengungkit, Palu, Senter, Meteran, Toolkit, lain-lain)			

Perlengkapan kantor yang ada seperti pada tabel 2.11 dipandang masih kurang dibanding dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya rak arsip tahan api. Hal tersebut sangatlah penting guna keamanan arsip/dokumen penting organisasi.

Belum adanya camera/drone untuk dokumentasi acara/kegiatan dan/ ataupun pembuatan video sosialisasi tentang perhubungan

**Tabel 2.11**

**Daftar Perlengkapan Gedung Kantor**

No	Nama Barang	Jml	Sat	Kondisi
1	Ac Unit	15	Unit	Baik
2	Camera Electronic	3	Unit	Baik
3	Dispenser	8	Unit	Baik
4	Filling Besi/Metal	13	Unit	Baik
5	Brankas	1	Unit	Baik
6	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Unit	Baik
7	Sound System	2	Unit	Baik
8	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik

Berbicara peralatan kantor dan rumah tangga seperti pada tabel 2.12 secara umum sudah memenuhi kebutuhan organisasi.

Namun untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas hasil pekerjaan perlu adanya tambahan beberapa peralatan kantor antara lain : Laptop/PC yang memiliki spesifikasi tinggi untuk menunjang dalam pekerjaan design baik arsitektur maupun design lain serta pekerjaan pembuatan/editing video.

Printer ukuran A3 masih perlu ditambah. Scanner yang memiliki spesifikasi tinggi dan mendukung pekerjaan arsip elektronik.

**Tabel 2.12****Daftar Peralatan Kantor dan Rumah Tangga**

No	Nama Barang	Jml	Sat	Kondisi
1	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	Unit	Baik
2	Handy Talky (Ht)	29	Unit	Baik
3	Kompor Gas	1	Unit	Baik
4	Mesin Bor Beton	1	Unit	Baik
5	Mesin Bor Tangan	1	Unit	Baik
6	Peralatan Tukang Besi Lain-lain/catok besi	1	Unit	Baik
7	Mesin Potong Rumput	2	Unit	Baik
8	P.C. Unit/Laptop	32	Unit	Baik
9	Pompa Tangan	3	Unit	Baik
10	Portable Water Pump	2	Unit	Baik
11	Printer	28	Unit	Baik
12	Proyektor + Attachment	1	Unit	Baik
13	Radio	1	Unit	Baik
14	Stationary Water Pump	2	Unit	Baik
15	Tabung Gas	1	Unit	Baik
16	Televisi	6	Unit	Baik
17	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	Unit	Baik
18	Recalver Hf/Lf	3	Unit	Baik
19	Scanner	4	Unit	Baik
20	Unintemuptible Power Supply (Ups)	1	Unit	Baik
21	Unit Pembangkit Uap Air Panas Lain-Lain	1	Unit	Baik
22	Unit Power Supply	11	Unit	Baik

Secara umum kebutuhan meubelair pada setiap ruangan sudah terpenuhi. Namun perlu diperhatikan ada beberapa meubelair yang kondisinya sudah kurang baik. Tingkat urgensinya rendah untuk diganti namun dari sudut estetika akan mengurangi keindahan dan kenyamanan. Diganti dan/atau perlu dilakukan perawatan yang cukup.

**Tabel 2.13**  
**Daftar Meubelair**

No	Nama Barang	Jml	Sat	Kondisi
1	Kursi Biasa	1	Unit	Baik
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	Baik
3	Kursi Lipat	40	Unit	Baik
4	Kursi Tamu	8	Unit	Baik
5	Lemari Es	1	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	11	Unit	Baik
7	Meja 1/2 Biro	6	Unit	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
9	Meja Piket	2	Unit	Baik
10	Meja Rapat	2	Unit	Baik
11	Rak-Rak Penyimpanan	9	Unit	Baik

**Prasarana :**

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
2. Gedung Kantor Terminal Cibeureum (Type C) yang terletak di Jl. Letkol Basyir Surya Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. Gedung Kantor Bidang Angkutan dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
4. Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Terminal yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
5. Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Parkir dan Workshop MRL yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

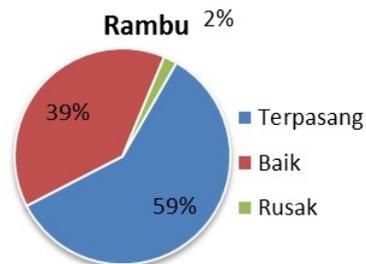
### C. DATA PRASARANA, FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas yang ada masih terdapat kekurangan. disamping untuk mengganti yang telah usang/rusak juga perlu pemasangan dilokasi baru lainnya. dari tabel 2.1. tersebut untuk jalan nasional masih perlu dipasang 22 rambu, jalan provinsi 87 rambu dan jalan kota 88 rambu.

**Tabel 2.14**

**KondisiRambu-Rambu Lalu Lintas**

No	Lokasi	Terpasang	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	175	120	55
2	Jalan Provinsi	256	135	121
3	Jalan Kota	1.575	791	784
Jumlah		2.006	1.046	960



Marka jalan yang ada masih terdapat kekurangan. Untuk di jalan nasional 1,402km, jalan provinsi 11,111km dan jalan kota 267,518km. Total kebutuhan jalan yang harus dipasang marka 280,031km.

Jumlah penerangan jalan umum di Kota Tasikmalaya mencapai 6.854 unit. Masih terdapat kekurangan 12 unit untuk jalan nasional, 203 untuk jalan provinsi dan 1.894 untuk jalan kota.

### Marka Jalan



**Tabel 2.15**  
Marka Jalan Menurut Kondisinya

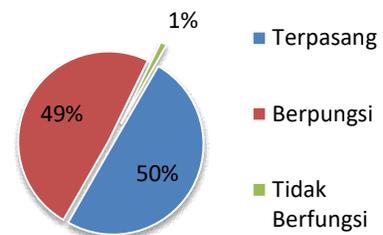
No	Lokasi	Terpasang (m2)	Kondisi		
			Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	807	50	20	30
2	Jalan Provinsi	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	1.272,2	85	20	20
Jumlah		3.622,2	55	27	27

8 unit di jalan nasional dibutuhkan pemeliharaan, 224 unit di jalan provinsi dan 320 di jalan kota.

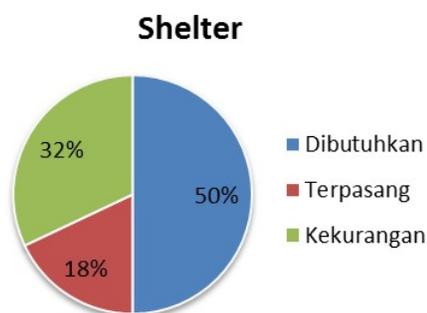
**Tabel 2.16**  
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	240	232
2	Jalan Provinsi	676	452
3	Jalan Kota	10.547	10.520
Jumlah		11.463	11.204

### PJU



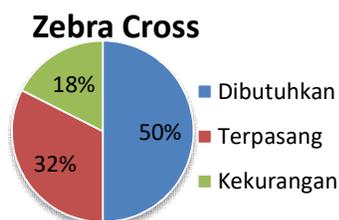
Shelter/Halte atau tempat pemberhentian angkutan umum, masih banyak yang harus dibangun. Untuk jalan nasional masih dibutuhkan 9 buah, jalan provinsi 9 buah dan jalan kota 5 buah.



**Tabel 2.17**  
**Shelter/ Halte Menurut Kebutuhannya**

No	Lokasi	Dibutuhkan	Terpasang
1	Jalan Nasional	13	4
2	Jalan Provinsi	10	1
3	Jalan Kota	23	19
Jumlah		64	24

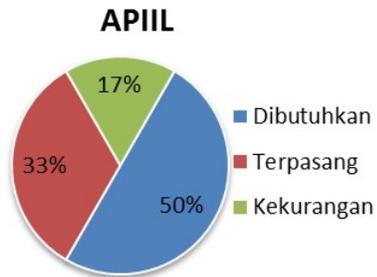
Zebra Cross atau fasilitas penyebrangan berupa marka jalan jumlahnya masih kurang dibanding dengan kebutuhan. Di jalan nasional masih dibutuhkan di 11 titik lokasi, jalan provinsi 27 titik lokasi dan jalan kota 39 titik lokasi.



**Tabel 2.18**  
**Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross)**

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	30	20
2	Jalan Provinsi	70	46
3	Jalan Kota	120	86
Jumlah		220	152

Alat pemberi isyarat lalu lintas masih dibutuhkan keberadaannya di beberapa lokasi. Di jalan nasional 2 buah, jalan provinsi 3 buah dan jalan kota 4 buah. Total untuk semua jalan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya adalah 9 buah.

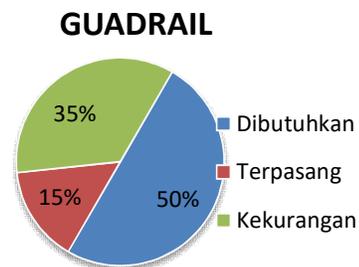


**Tabel 2.19**  
**Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya**

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	8	6
2	Jalan Provinsi	7	4
3	Jalan Kota	12	7
Jumlah		27	17

Guard Rail atau pagar pengaman jalan antara kebutuhan dengan yang ada hanya kekurangan sebanyak 700m, untuk jalan provinsi 500m dan jalan kota 200m.

Upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan tersebut adalah dengan pengalokasian anggaran baik dari APBD Kota untuk di jalan kota dan pengajuan usulan kebutuhan ke provinsi.

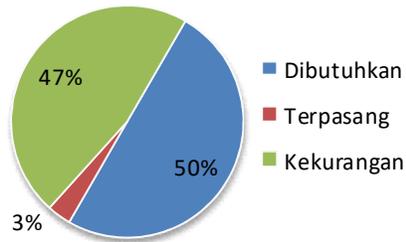


**Tabel 2.20**  
**Guard Rail (Pagar Pengaman)**

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Terpasang (meter)
1	Jalan Nasional	-	-
2	Jalan Provinsi	700	200
3	Jalan Kota	300	61
Jumlah		1.000	261

Cermin tikungan yang saat ini terpasang jumlahnya sangat sedikit. Dari 30 buah yang dibutuhkan baru 2 buah yang terpasang. Jalan nasional dibutuhkan 4 buah, jalan provinsi 6 buah dan jalan kota 18 buah.

### CERMIN TIKUNGAN

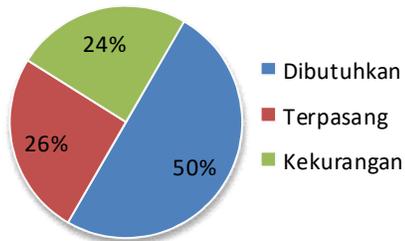


**Tabel 2.21**  
Cermin Tikungan

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	4	-
2	Jalan Provinsi	6	-
3	Jalan Kota	20	2
Jumlah		30	2

Pita Penggaduh yang saat ini terpasang jumlahnya sangat sedikit. Dari 43 buah yang dibutuhkan baru 22 buah yang terpasang. Jalan nasional masih dibutuhkan 4 buah, jalan provinsi 4 buah dan jalan kota 13 buah.

### PITA PENGGADUH



**Tabel 2.22**  
Pita Penggaduh

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	10	6
2	Jalan Provinsi	8	4
3	Jalan Kota	25	12
Jumlah		43	22

Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau lebih ruas jalan bertemu, di sini arus lalu lintas mengalami konflik.

Persimpangan sederhana, bila arus masih rendah dan kecepatan lalu lintas rendah dapat diterapkan, di mana kendaraan yang datang dari kiri mendapat prioritas lebih dulu. Persimpangan seperti ini banyak ditemukan di jalan lingkungan kawasan pemukiman.

Persimpangan prioritas, bila suatu persimpangan arus di jalan utama (mayor) bersimpangan dengan jalan kecil (minor) maka kendaraan yang berada di jalan utama mendapat hak terlebih dahulu.

Dari tabel di atas, jumlah persimpangan sederhana berjumlah 46 dan persimpangan prioritas sebanyak 42.

**Tabel 2.23**  
**Persimpangan**

No	Status Persimpangan Jalan	Jumlah Persimpangan	Jumlah Persimpangan Prioritas
1	Nasional-Nasional	-	-
2	Nasional-Provinsi	1	1
3	Nasional-Kota	16	5
4	Provinsi-Provinsi	3	3
5	Provinsi-Kota	26	32
6	Kota	-	-
Jumlah		46	42

**Tabel 2.24**  
**Traffic Light Berbasis ATCS**

Kecamatan	Simpang/Ruas	Jumlah CCTV	
		Fix	PTZ
Bungursari	Rancabango	2	1
	Bantar		1
Cibeureum	-		
Cihideung	Padayungan	1	
	Nagarawangi		1
	Paseh		1
	Gn Sabeulah		1
	Pataruman	1	1
	Panyerutan	1	1
	Cihideung		1
Cipedes	Simpang 5		1
	Mitrabatik		1
	Cibogor	3	
	Karang Resik		1
Indihiang	Moh Hatta	1	
	Jati		1
	Leuwidahu	2	
	Bojong Jengkol	2	
	Wasita	3	
	Batas Kota Arah Bandung		1
Mangkubumi	-		
Purbaratu	-		
Tamansari	-		
Tawang	Dewi Sartika	2	
	Mesjid Agung	1	1

	Rumah Sakit		1
	Sutisna Senjaya	1	
	Alun-Alun	3	
	Cimulu		1
	Taman Kota		1
	Taman Alun-Alun		1
Jumlah		23	18

**Tabel 2.25**  
**Ruang Parkir Pada Badan Jalan**

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)	Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)
1	Jalan Nasional	-	-	-
2	Jalan Provinsi	1	-	250m
3	Jalan Kota	33	8,8	7,8
Jumlah		34	8,8	7,825

Ruang parkir adalah ruang yang di diakan untuk parkir kendaraan baik roda 2 maupun lebih. Panjang jalan kota yang digunakan untuk parkir sepanjang 7,8km dan jalan provins sepanjang 250m.

Berikut ruas jalan yang digunakan sebagai ruang parkir adalah :

**(1) Lokasi Jalan Umum Tertentu:**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Jl. KHZ. Mustofa;  | 6. Jl. Veteran;              |
| 2. Jl. Pasar Wetan;   | 7. Jl. Mesjid Agung;         |
| 3. JL. Yudanegara;    | 8. Jl. Selakaso;             |
| 4. Jl. Dr. Soekardjo; | 9. Jl. Pataruman;            |
| 5. Jl. Nagrawangi;    | 10. Jl. Tentara Pelajar;     |
|                       | 11. Jl. Gunung Sabeulah; dan |
|                       | 12. Jl. Mitra Batik.         |

**(2) Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu :**

1. Jl. Cihideung Balong;	13. Jl. Ahmad Yani;
2. Jl. Otto Iskandardinata;	14. Jl. Dewi Sartika;
3. Jl. Tarumanegara;	15. Jl. Perintis Kemerdekaan;
4. Jl. RAA. Wiratanuningrat;	16. Jl. Pasar Baru;
5. Jl. Siliwangi;	17. Jl. Cieunteung;
6. Jl. Mayor Utarya;	18. JL. M. Sl. Tobing;
7. Jl. R. Ikik Wiradikarta;	19. Jl. Sukalaya;
8. Jl. Rumah Sakit Umum;	20. Komplek Pasar Cikurubuk
9. Jl. Pemuda;	21. Komplek Pasar Indihiang
10. Jl. Sutisna Senjaya;	22. Insidentil

11. Jl. Sukawarni;	
12. Jl. Paseh;	

**Data Terminal/TPK**

**Tabel 2.26**  
**Terminal Angkutan Penumpang**

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) :

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. TPK Nyantong     | 9. TPK Awiluar                  |
| 2. TPK Muncang      | 10. TPK Gobang                  |
| 3. TPK Cikadongdong | 11. TPK Cibunigeulis            |
| 4. TPK Leuwidahu    | 12. TPK Asta                    |
| 5. TPK Karangresik  | 13. TPK Pamipiran               |
| 6. TPK Cigeureung   | 14. TPK Bumi Resik Panglayungan |
| 7. TPK Gegernoong   | 15. TPK Sindang Galih           |
| 8. TPK Cipeusar     | 16. TPK Perum Kota Baru         |

**Tabel 2.27**  
**Rata-Rata Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang**  
**Yang Masuk Terminal**

No.	Nama Terminal	Tipe	Rata-Rata	
			Per Hari	Per Bulan
1.	Terminal Pancasila	C	85	2738
2.	Terminal Padayungan	C	77	2447
3.	Terminal Cikurubuk	C	104	3384

4..	Terminal Awipari	C	33	1043
-----	------------------	---	----	------

Data dari bulan Jan s.d Jun 2023

**Tabel 2.28**  
**Rata-Rata Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang**  
**Yang Masuk Terminal Sesuai Jenis Pelayanan Angkutan**

No	Nama Terminal	Jenis Pelayanan Angkutan	Rata-Rata	
			Per Hari	Per Bulan
1	Terminal Pancasila	Angkutan Perbatasan	15	760
		Angkutan Kota	85	2185
2	Terminal Padayungan	Angkutan Perbatasan	20	1234
		Angkutan Kota	77	1046
3	Terminal Cikurubuk	Angkutan Perbatasan	30	1186
		Angkutan Kota	104	1948
4	Terminal Awipari	Angkutan Perbatasan	11	443
		Angkutan Kota	33	548

Data Bulan Juni 2023

**Tabel 2.29**  
**Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji**

No	Jenis Kendaraan	2015 / unit		2016 / unit		2017 / unit	
		WU	R	WU	R	WU	R
1	Bus Umum						
	*. Ukuran besar	659	1320	713	1.427	695	1.401
	*. Ukuran sedang	286	573	404	618	259	524
	*. Ukuran kecil	787	1573	779	1.558	621	1.241
2	Bus Bukan Umum	45	112	55	146	57	150
3	MPU	94	196	107	214	92	183
4	Taksi	44	88	41	81	36	72
5	Kendaraan roda	-	-	-	-	-	-

	3						
6	Pick up	2708	6.699	2.855	7.099	2.385	6.068
7	Truk sedang	3024	7.521	3.204	7.770	2.790	6.694
8	Truk berat	446	951	477	1.032	464	989
9	Kereta gandengan						
10	Kereta tempelan	101	216	107	233	89	194
11	Penarik (tractor head)	91	224	103	234	83	196
	Jumlah	6.285	19.473	8.845	20.412	7.570	17.712

**Tabel 2.30**  
**Data Trayek Angkutan Kota**

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	Jumlah Armada (unit)				
			Mobil Penumpang Umum				Sisa
			Alokasi	Realisasi	Status		
Aktif	Non Aktif						
1	01	27	91	91	49	42	0
2	02	16	52	49	10	39	3
3	03	19,5	125	122	50	72	3
4	04	23	100	92	53	39	8
5	05	23,5	150	141	59	82	9
6	06	23	33	21	14	7	12
7	07	23	70	63	32	31	7
8	08	23	70	60	11	49	10
9	09	25	56	27	11	16	29
10	09 A	30	35	32	21	11	3
11	010	34,5	71	67	31	36	4
12	011	16	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	15	8	5

14	012 A	20	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	20	27	3
16	014	33	20	16	9	7	4
17	015	44	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	7	14	14
19	017	13	35	35	23	12	0
20	018	19,5	40	25	12	13	15
21	019	28	19	18	8	10	1
<b>Jumlah</b>			<b>1.138</b>	<b>1.002</b>	<b>456</b>	<b>546</b>	<b>136</b>

**Tabel 2.31**  
**Panjang Jalan yang dilayani Trayek Angkutan**

No	Status Jalan	2015 / Km	2016 / Km	2017 / Km
1	Jalan Nasional/ Negara	9,52	9,52	9,52
2	Jalan Provinsi	31,89	31,89	31,89
3	Jalan Kota	461,32	485,00	485,00
<b>Jumlah</b>		<b>502,73</b>	<b>526,41</b>	<b>526,41</b>

**Jumlah Kelurahan Yang Telah Dilayani Trayek Angkutan**

**1. Kecamatan Bungursari**

- Kelurahan/Desa Bantarsari (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Cibunigeulis (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sukamulya (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sukarindik (Kodepos : 46151)

**2. Kecamatan Cibeureum**

- Kelurahan/Desa Awipari (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Kersanagara (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Kotabaru (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Margabakti (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Setiajaya (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Setianagara (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Setiaratu (Kodepos : 46196)

### 3. Kecamatan Cihideung

- Kelurahan/Desa Yudanagara (Kodepos : 46121)
- Kelurahan/Desa Argasari (Kodepos : 46122)
- Kelurahan/Desa Cilembang (Kodepos : 46123)
- Kelurahan/Desa Nagarawangi (Kodepos : 46124)
- Kelurahan/Desa Tuguraja (Kodepos : 46125)
- Kelurahan/Desa Tugujaya (Kodepos : 46126)

### 4. Kecamatan Cipedes

- Kelurahan/Desa Sukamanah (Kodepos : 46131)
- Kelurahan/Desa Nagarasari (Kodepos : 46132)
- Kelurahan/Desa Cipedes (Kodepos : 46133)
- Kelurahan/Desa Panglayungan (Kodepos : 46134)

### 5. Kecamatan Indihiang

- Kelurahan/Desa Indihiang (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Parakannyasag (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sirnagalih (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sukamajukaler (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sukamajukidul (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Panyingkiran (Kodepos : 46411)

### 6. Kecamatan Kawalu

- Kelurahan/Desa Cibeuti (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Cilamajang (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Gununggede (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Karanganyar (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Karsamenak (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Leuwiliang (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Talagasari (Kodepos : 46182)

- Kelurahan/Desa Tanjung (Kodepos : 46182)
- Kelurahan/Desa Urug (Kodepos : 46182)

#### **7. Kecamatan Mangkubumi**

- Kelurahan/Desa Cipari (Kodepos : 46181)
- Kelurahan/Desa Cipawitra (Kodepos : 46181)
- Kelurahan/Desa Linggajaya (Kodepos : 46181)
- Kelurahan/Desa Mangkubumi (Kodepos : 46181)
- Kelurahan/Desa Sambongjaya (Kodepos : 46181)
- Kelurahan/Desa Sambongpari (Kodepos : 46181)

#### **8. Kecamatan Purbaratu**

- Kelurahan/Desa Purbaratu (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Singkup (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Sukamenak (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Sukanagara (Kodepos : 46196)

#### **9. Kecamatan Tamansari**

- Kelurahan/Desa Mulyasari (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Setiamulya (Kodepos : 46196)
- Kelurahan/Desa Sukahurip (Kodepos : 46196)

#### **10. Kecamatan Tawang**

- Kelurahan/Desa Lengkongsari (Kodepos : 46111)
- Kelurahan/Desa Tawangsari (Kodepos : 46112)
- Kelurahan/Desa Empangsari (Kodepos : 46113)
- Kelurahan/Desa Cikalang (Kodepos : 46114)
- Kelurahan/Desa Kahuripan (Kodepos : 46115)

### **Jumlah Kelurahan Yang Belum Dilayani Trayek Angkutan**

#### **1. Kecamatan Bungursari**

- Kelurahan/Desa Bungursari (Kodepos : 46151)
- Kelurahan/Desa Sukajaya (Kodepos : 46151)

- Kelurahan/Desa Sukalaksana (Kodepos : 46151)

**2. Kecamatan Cibeureum**

- Kelurahan/Desa Ciakar (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Ciherang (Kodepos : 46416)

**3. Kecamatan Kawalu**

- Kelurahan/Desa Gunungtandala (Kodepos : 46182)

**4. Kecamatan Mangkubumi**

- Kelurahan/Desa Cigantang (Kodepos : 46181)

- Kelurahan/Desa Karikil (Kodepos : 46181)

**5. Kecamatan Purbaratu**

- Kelurahan/Desa Sukaasih (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Sukajaya (Kodepos : 46196)

**6. Kecamatan Tamansari**

- Kelurahan/Desa Mugarsari (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Setiawargi (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Sumelap (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Tamanjaya (Kodepos : 46196)

- Kelurahan/Desa Tamansari (Kodepos : 46196)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi**

Arah kebijakan presiden Joko Widodo untuk periode kepemimpinan kedua adalah : Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi, Mendorong Investasi dan Penggunaan APBN.

Yang menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah Konektivitas dan Aksesibilitas, Tingkat Layanan dan Keselamatan dan Keamanan dengan agenda Pariwisata, Logistik, 3T, IKN Baru. Dukungan Kementerian Perhubungan R.I dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Program Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, fokus wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Program Infrastruktur Ekonomi dengan kegiatan Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Udara, fokus Kawasan Industri dan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan;
3. Program Infrastruktur Perkotaan dengan kegiatan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, fokus 15 perkotaan di Indonesia.

Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

2020-2024 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan propinsi/kabupaten/ kota.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, konektivitas dan aksesibilitas serta peningkatan layanan.

1. Keselamatan dan Keamanan, meliputi sasaran :

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi ke dan dari kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus.

2. Konektivitas dan aksesibilitas, meliputi sasaran :

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke dan dari Kawasan Industri dan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

3. Peningkatan layanan

Skor 90 pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025**

Tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk mendukung program daerah Nomor 9 : “Peningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas” pada tujuan nomor 4 “Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan “ dan sasaran nomor 9 “Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas “. Serta untuk mendukung program daerah Nomor 11 “Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi”, pada tujuan nomor 5 “Terwujudnya implementasi

reformasi birokrasi“ dan sasaran nomor 11 “Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi”

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam mendukung tujuan, sasaran dan program daerah adalah :

**Tabel.3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

<b>Tujuan Daerah (T4)</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan</b>		
<b>Sasaran Daerah (S9)</b>	<b>Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas</b>		
<b>Program Daerah (P9)</b>	<b>Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan
<b>Tujuan Daerah (T5)</b>	<b>Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</b>		
<b>Sasaran Daerah (S11)</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi</b>		
<b>Program Daerah (P11)</b>	<b>Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan layanan publik yang profesional,Inovatif, dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Percepatan penyerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik,serta peningkatan keterbukaan infirmasi dan komunikasi publik.

	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif, transparan dan akuntable.</li> <li>2. Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntable serta mengacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.</li> </ol>
--	---	--	---

Adapun rincian target capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja DISHUB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	66,09	67,23	68,62	70,27	72,16	72,16
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai (Kategori)	78,00 (B)	79,00 (B)	79,50 (B)	80,00 (B)	80,50 (B)	80,50 (B)
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai (Kategori)	82,59 (A)	82,60 (A)	82,65 (A)	82,68 (A)	82,75 (A)	82,75 (A)

### 3.3. Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>		<b>Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan</b>
<b>1.</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksana dan ditetapkan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>
	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota</b>
	1. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
	2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	3. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
	4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
<b>3.</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>
	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>4.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan</b>	<b>Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan</b>

Jalan Kabupaten/Kota		kabupaten/kota
1.	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
3.	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
4.	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
5.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
<b>5.</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota</b>
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2.	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin
3.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
4.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>		<b>Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan cerdas dan berkeselamatan</b>
<b>6.</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</b>
1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2.	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal
3.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal
4.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
5.	Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
<b>7.</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor</b>
1.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	4.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	5.	Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
	6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	7.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	8.	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
<b>8.</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
	1.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.	Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
<b>9.</b>		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
	1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>2.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>3.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4.</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
	4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik</b>
<b>1.</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</b>
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	7.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>4.</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>
	1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
	2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

<b>5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						<b>39.064.769.100,00</b>							<b>58.715.485.714,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.064.769.100,00							58.715.485.714,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						39.064.769.100,00							58.715.485.714,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai IKM Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			80 (B) Nilai/ Kategori 82,65 (A) Nil ai/kategori	35.577.180.100,00						-	44.975.085.714,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			89 Dokumen	82.000.000,00			-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-	-	151.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	62.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				30 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	20.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			12 Dokumen	10.043.843.362,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		11.374.337.389,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				81 Orang/bulan	10.033.843.362,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		11.334.337.389,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	35.000.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-			5 Dokumen	5.000.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			2 Dokumen	5.000.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				400 Paket	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah administrasi umum perangkat daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah</i>	-			11 Paket 11 Paket	274.749.400,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		829.277.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	4.900.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		5.512.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	2.500.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	23.999.500,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	43.309.900,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		55.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		39.690.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				0 Paket	25.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	30.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	115.040.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		330.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				3 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		88.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		88.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			8 Unit 8 Unit	0,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	604.225.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		55.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		16.537.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		16.537.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		11.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			24 Laporan 24 Laporan	24.774.081.338,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	31.124.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	2.400.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		16.537.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	24.385.925.738,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		31.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		27.562.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	385.755.600,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			73 Unit	357.506.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	657.145.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				0 Unit	137.122.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		154.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	220.384.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		255.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		62.015.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase layanan angkutan berkeselamatan Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan</b>	-			<b>78,32 % 58,93 %</b>	<b>3.487.589.000,00</b>						-	<b>13.740.400.000,00</b>	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota tersusun</i>	-			1 Dokumen	0,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun dan terpelihara</i>	-			1106 Unit	2.556.050.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	8.235.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				2 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				700 Unit	1.605.200.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		5.625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				2 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				600 Unit	950.850.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		2.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>	-			5 Unit	163.350.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	380.362.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun</i>				1 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		55.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi</i>				20 Dokumen	163.350.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		159.862.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>				1 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		55.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				1 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		110.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir diterbitkan</i>	-			2 Dokumen	242.844.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		725.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				50 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukalaksana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	242.844.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor</i>	-			12 Laporan	50.000.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		1.740.375.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				0 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	50.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		165.375.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota terlaksana	-			1 Dokumen	276.000.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	1.400.887.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	266.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		27.562.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	5.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		33.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				100 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	5.000.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		110.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota dihasilkan	-			5 Dokumen	0,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-	-	46.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				5 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi</i>				5 Orang	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>				5 Laporan	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		11.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota tersedia</i>	-			2 Unit	199.345.000,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		303.187.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				0 Laporan	13.045.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		110.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	186.300.000,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		192.937.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ditetapkan</i>	-			1 Dokumen	0,00			-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		909.562.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		468.562.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	-		165.375.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kota Tasikmalaya, Bungursari, Sukamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Infrastru ktur perkotaan dan permuk iman	-		275.625.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
<b>J U M L A H</b>								<b>39.678.843.362,00</b>							<b>58.715.485.714,00</b>	

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra Perangkat Daerah serta mencapai Visi dan Misi dalam RPJMD. Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Tasikmalaya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 20123-2026 sebagai penjabaran Visi Misi Kota Tasikmalaya periode 2024 serta mengacu kepada dokumen perencanaan Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 yang memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja dan kerangka anggaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 12 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2025, dengan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **5.2 REKOMENDASI**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

pembangunan, maka direkomendasikan kepada semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Sinkronisasi, sinergitas dan intergrasi perencanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota / APBD Provinsi / APBN / PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah sangatlah diperlukan dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2024.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2024, agar difasilitasi melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik.
4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka masing-masing unit yang mengelola kegiatan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tahun 2025, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan.
6. Pada akhir tahun anggaran 2025, masing-masing unit yang mengelola kegiatan wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
7. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh unit yang mengelola kegiatan, Kepala Dinas menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, menjadi dasar bahan penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2025, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan mengindahkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saran, kritik dan masukan-masukan sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan pada tahun berikutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TASIKMALAYA



Drs. H. ASEP MAMAN PERMANA, M.S,i  
NIP. 19660916 1988031 004